

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA

Kasus Positif
95,418
+ 1,761Sembuh
53,945
+ 1,781Meninggal
4,665
+ 89Seluruh
Positif 15
Sembuh 9
Meninggal

TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

ita Diminta Legawa Bangun Jakarta • Banyak Warga Tetap tidak Pakai Masker • Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang • Sindikat Malaysia-Afrika Sasar Indonesia • Pe

Jumat 20 September 2019, 07:05 WIB

Pengawasan Wujud Perlindungan Hak Rakyat

Atang Irawan Pengamat Hukum Tata Negara | Opini



Dok.MI/Grafis Seno

opini

"POWER tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely." (Kekuasaan cenderung korup; kekuasaan mutlak benar-benar merusak).

Kalimat di atas merupakan narasi yang tidak asing lagi terlintas dalam pikiran semua manusia meskipun akan kaget bagi sejarawan moralis Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton yang dikenal dengan Lord Acton (1833-1902). Jika kekuasaan absolut masih digandrungi oleh banyak manusia dan institusi dalam negara demokrasi, bahkan banyak yang phobia jika kekuasaannya tidak tak terbatas, impresi yang berlebihan terhadap pembatasan kekuasaan ialah kewajaran menurut daya nalar manusia. Namun demikian, hal itu semestinya diletakkan pada kelaziman bangunan organ negara.

Prinsip check and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang wajar dan lazim dipergunakan dalam negara-negara yang menganut paham demokrasi, yang organ-organ negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaiknya, sehingga segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan ditanggulangi. Dengan demikian, pengawasan merupakan salah satu instrumen dalam prinsip checks and balances, bahkan hal ini menjadi salah satu semangat kebangsaan dalam merumuskan amandemen UUD 1945 karena demokrasi mengandung makna prinsip kesetaraan dalam setiap organ negara, sehingga tidak lagi ditemukan organ negara yang super power.

Berita Terkini**Hari Kedua, Operasi Patuh Jaya Kendaraan**

MEGAPOLITAN

Kendaraan bermotor paling banyak mendapatkan penilangan. Melawan arus menjadi salah satu alasan diberikan...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:39 WIB

Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

AS-Indonesia Tanda Tangan Ker Pembangunan

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan ini hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

Satu Pasien Positif Covid-19 Kabu Wisma Atlet

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

Sumut Mulai Rutin Ekspor Wortu Dunia

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belaw Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020,...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

Warga Sorong Palang Jalan Akib Berulang

NUSANTARA



banyak kalangan. Ada kecemasan dengan adanya dewan pengawas dapat melemahkan institusi KPK karena melahirkan intervensi dalam penegakan hukum. Namun perlu diperhatikan bahwa pengawasan harus diartikan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang serta etika dan perilaku person yang melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

KPK merupakan lembaga yang sangat penting. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK diberikan keleluasaan oleh undang-undang untuk melakukan pengecualian terhadap HAM, misalnya penyadapan, dan bahkan tidak menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Penyimpangan terhadap HAM secara konstitusional sebaiknya diletakkan bukan pada kebebasan tak terbatas meskipun diperbolehkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, melainkan harus dipergunakan dengan prinsip kehati-hatian dan profesional karena jika penyimpangan itu dilaksanakan secara tidak terbatas, akan berimplikasi pada hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jaminan perlindungan terhadap Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 merupakan keharusan. Acap kali terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau melampaui wewenangnya, sebuah institusi negara, misalnya terkait dengan beberapa kasus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi prosesnya masih mengambang. Padahal, pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka berbagai macam sanksi sudah melekat pada jabatan, sosial, dan lain-lain sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum. Sementara itu, institusi tersebut dilarang oleh UU untuk menetapkan SP3. Dengan demikian, pengawasan itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat.

Hal yang sangat signifikan dalam pengawasan yang perlu dikaji secara komprehensif ialah pengawasan itu tidak melahirkan intervensi untuk membatasi penegakan tindak pidana korupsi. Namun, pengawasan itu harus diletakkan sebagai salah satu instrumen bagi KPK untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan profesional dalam menegakkan tindak pidana korupsi dengan menekankan pada kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, menjadi penting seorang anggota dewan pengawas memiliki integritas, negarawan, dan berpengalaman di bidang hukum serta tidak pernah terindikasi memiliki masalah hukum.

Untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme maka pengawasan dapat dilakukan melalui model (1) preliminary control, yaitu pengawasan sebelum pelaksanaan penegakan hukum, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang (tebang pilih), (2) feed back control, yakni pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil pelaksanaan tugas dan wewenang, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Untuk menghindari intervensi pelaksanaan tugas dan wewenang atau melemahkan institusi KPK itu, dewan pengawas sebaiknya tidak melaksanakan pengawasan dalam bentuk concurrent control atau pengawasan yang dilaksanakan pada saat tugas dan wewenangnya sedang dijalankan.



TAGS: <#> [# Opini](#)

0 Comments

Sort by [Oldest](#)

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga

Naik Kelas di Tengah Wabah

Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB

Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...

Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN

Anies memaparkan dalam dua minggu terakhir positivity rate Jakarta terus meningkat, dimulai dari angka 4,8%...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

Selengkapnya

Top Tags

[# Babel](#)

[# Jokowi](#)

[# Anies Baswedan](#)

[# an](#)

[# PSBB](#)

BenihBaik.com

Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurkan donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

Kimia Farma Sumbang Rp1 Milia

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medis yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

Media Group Kembali Salurkan Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Ji Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS R 19 via BenihBaik.com

HUMANIORA

"Inisiatif AAJI kali ini, yaitu "Bersama Kita Bisa yang diikuti oleh seluruh perusahaan...

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

Benih Baik Hadapi Gelap dengan

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

Selengkapnya

Berita Populer

Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yc Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

Pelaku Pembunuhan Yodi Prab

MEGAPOLITAN



MEDIA
INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA
INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di www.mediaindonesia.com bisa disampaikan melalui email...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

Polisi Sebut Dua Pria yang Berjal Yodi bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

CCTV Menunjukkan Waktu Yodi l

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi deng Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

Polisi Temukan Ceceran Darah d Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lapo daripada ke sawah membantu sang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

Selengkapnya

Berita Weekend

Ketahui Cara Tepat Mengenakan

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

Pandemi, Penjualan Sepeda di Sh Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

Kiat Menangani Barang-Barang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

Tips Sehat Berbelanja di Masa Pe

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarke atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

Selengkapnya

RUBRIKASI

OPINI

Editorial

Podium

Kolom Pakar

EKONOMI

Politik dan

Hukum

HUMANIORA

Nusantara

OLAHRAGA

Sepak Bola

Otomotif

WEEKEND

Megapolitan

VIDEO

Foto

Infografis

Berita
Marcom
Publishing
Rss

Tentang
Beriklan
Contact
Karir
Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI DI

Youtube
Facebook
Twitter
Contact Info

INFORMASI

Phone: 021 582 1303
Fax: 021 582 0476
Email: cs@mediaindonesia.com
marketing.onlinedigital@mi.